

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan pendidikan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sering diibaratkan sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kebesaran dari suatu bangsa. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kebutuhan asasi manusia. Hal ini sudah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa: (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah telah merancang sebuah sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas). Tujuan penyelenggaraan pendidikan

nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terdapat tiga pilar kebijakan pendidikan yang hendak dicapai dari sistem pendidikan nasional, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang terkait dengan efisiensi manajemen pendidikan. Terkait aspek pemerataan dan perluasan akses sampai tahun 2004, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,2 tahun. Sementara angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas baru mencapai 90,45% (BPS, 2004) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia SLTA 53,48% (BPS, 2004).

Berkaitan dengan mutu pendidikan ada 4 aspek yang dinilai masih menjadi persoalan dan harus mendapatkan perhatian (Diknas, 2004): (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kesejahteraannya yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas; (2) prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan belum didayagunakan secara optimal; (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran; (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Rendahnya keempat aspek tersebut diatas dapat berakibat pada rendahnya prestasi belajar siswa.

Prestasi belajar siswa menjadi indikator mutu sekolah. Prestasi belajar siswa bukan hanya menyangkut aspek akademik maupun non akademik, tetapi termasuk aspek *hardskill*, *softskill* maupun *lifeskill* dan berdasarkan kebijakan pemerintah ditunjukkan pula oleh nilai ketercapaian standar kelulusan siswa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Apabila membandingkan mutu pendidikan Indonesia dengan mutu pendidikan negara-negara lain, mutu pendidikan Indonesia sangat jauh tertinggal. Laporan *the International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA), sebuah lembaga internasional yang berpusat di Amsterdam didirikan tahun 1959 dengan keanggotaan 50 negara, menyimpulkan bahwa nilai keterampilan membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara lain dan berada dalam urutan terbawah (Bahrul Hayat, 2010: 7).

Menurut survei *Political and Risk Consultant (PERC)* mutu pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam (Borneonews, 5 September 2011). Survei tahun 2007 yang dilakukan *World Competitiveness Year Book* melaporkan, bahwa daya saing pendidikan Indonesia berada pada urutan ke 53 dari 55 negara yang disurvei. Hal ini membuktikan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain.

Harian Sindo melaporkan terjadinya penurunan mutu sekolah di beberapa kota besar berdasarkan hasil UN SMA 2011 (Harian Sindo: Rabu, 25

Mei 2011). Dalam skala regional rendahnya mutu sekolah, khususnya SMA di Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Rata-Rata Ujian Akhir SMA
Provinsi Jawa Barat

No.	Tahun Pelajaran	Rata-rata UAN
1.	2004/2005	5,39
2.	2005/2006	5,28
3.	2006/2007	6,28
4.	2007/2008	7,07
5	2008/2009	7,71
6	2009/2010	7,05

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2010

Data tersebut menunjukkan, bahwa nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional siswa SMA di Propinsi Jawa Barat masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat di bawah standar nilai yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah.

Rendahnya mutu sekolah ternyata bukan hanya pada rendahnya nilai akademik siswa yang dibuktikan dengan rendahnya nilai ujian nasional, tetapi juga tampak pada rendahnya ranah afektif yang ditandai dengan rendahnya nilai kepribadian, sikap dan perilaku peserta didik, seolah terjadi adanya pergeseran tatanan kehidupan keseharian pada peserta didik, serta rendahnya ranah psikomotorik, dimana aktivitas peserta didik lebih tertuju pada aspek kehidupan yang menyenangkan menurut dirinya dibandingkan dengan rasa butuh terhadap proses belajar. Permasalahan tersebut, harus disikapi segera oleh pihak sekolah.

Data lain yang menunjang terhadap masih rendahnya mutu sekolah diantaranya seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Hasil Evaluasi Mutu Sekolah Kota Bandung

No	Komponen yang Dievaluasi	Hasil Evaluasi (Efektivitas (%))	Keterangan
1	Rata-rata Hasil Ujian nasional	61,8%	Belum Optimal
2	Kompetensi Guru	64,3%	Belum Optimal
3	Kompetensi Kepala Sekolah	65,1%	Belum Optimal
4	Kreativitas Guru	55,3%	Belum Optimal
5	Kreativitas Kepala Sekolah	64,1%	Belum Optimal

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung 2011

Data tersebut menunjukkan, bahwa mutu lulusan jika dilihat pada aspek kognitif dari hasil ujian nasional hanya mencapai 61,8%, menunjukan angka yang sangat riskan. Begitu pula dengan kompetensi kepala sekolah dan juga kompetensi guru.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengangkat judul penelitian: **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Mengajar Guru, Fasilitas Belajar dan Lingkungan Belajar Terhadap Mutu Sekolah (Studi Pada SMA Terakreditasi A di Kota Bandung)”**

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada paparan di atas, maka hakekatnya penelitian ini merupakan kajian yang lebih memfokuskan pada suatu isu sentral, yakni rendahnya mutu sekolah. Kajian tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada mutu sekolah penulis gambarkan dalam bentuk *Fishbone Analysis*. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu sekolah, diantaranya adalah kepemimpinan kepala

sekolah, kinerja mengajar guru, fasilitas belajar dan lingkungan belajar (Mortimore, 1991; Shannon & Bysma, 2005; Purkey & Smith, 2008; James M Lipham, 1985; Eric Jensen, 2010; Diknas, 2006).

1. Kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah diartikan sebagai upaya kepala sekolah dalam menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, membimbing, menasihati, seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah (guru, staf, siswa) agar mau bekerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu sekolah. Rendahnya kepemimpinan kepala sekolah dapat mengakibatkan rendahnya mutu sekolah. Hasil evaluasi mutu sekolah Kota Bandung Tahun 2011 menunjukkan, bahwa kompetensi dan kreativitas kepala sekolah Kota Bandung berada pada kategori belum optimal (Disdik Kota Bandung, 2011).
2. Kinerja mengajar guru. Guru merupakan komponen penting di sekolah yang memiliki tugas sebagai pendidik sekaligus pengajar. Guru harus memiliki kualifikasi formal. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Sementara terkait dengan kinerja mengajar guru, maka guru harus memiliki kemampuan dalam membuat dan melaksanakan pra pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, evaluasi/penilaian, tindak lanjut. Data di Jawa Barat tahun 2009 menunjukkan, bahwa dari jumlah guru sebanyak 348.468 orang hanya 45% saja guru yang berijazah S1 (158.520), 0,08% berijazah S2 (3.006) dan 0,004% (17). Selebihnya (54,916%) guru berijazah non-sarjana (Ditjen

PMPTK (2009). Data sertifikasi guru tahun 2006-2007 menunjukkan bahwa dari kuota 20.806 orang, yang lulus Portofolio hanya 8.706 orang, lulus PLPG 9.655 orang, dan tidak lulus 2.345 orang. Di tahun 2008, dari kuota sertifikasi guru sebanyak 21.534 orang. Lulus Portofolio 10.861 orang, lulus PLPG 9.548, dan tidak lulus sebanyak 1.007 orang. Di tahun 2009, dari kuota nasional 201.102 orang, lulus Portofolio 90.619, lulus PLPG 108.539 orang, dan sisanya tidak lulus (Direktorat Profesi Pendidik dalam <http://sertifikasiguru.org>). Selama pelaksanaan sertifikasi bergulir dari tahun 2006 sampai 2009, dari total 601.552 guru yang mengikuti sertifikasi, yang lulus portofolio hanya 41,73%. Guru yang tidak lulus portofolio tersebut diwajibkan mengikuti diklat PLPG, dan lulus PLPG 50,33%. Ini berarti masih ada yang tidak lulus 7,94%. Data terbaru yang dirilis Kompas (4 Agustus 2012) dari hasil UKG (uji kompetensi guru) menunjukkan, bahwa dari jumlah guru yang mengikuti UKG sebanyak 373.415 dari TK hingga SMA hanya 10 persen guru yang mendapat nilai diatas 70, sementara nilai rata-rata UKG tergolong rendah hanya 44,5 padahal standar nilai minimal yang ditetapkan pemerintah adalah 70. Apalagi yang diukur dalam UKG bukan hanya kemampuan pedagogi atau metode pengajaran, melainkan juga kapasitas pengetahuan dan pemahaman guru pada bidang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja mengajar guru masih tergolong rendah.

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Untuk mengetahui apakah tugas, tanggungjawab dan wewenang

guru sudah dilaksanakan atau belum maka perlu adanya penilaian objektif terhadap kinerja. Penilaian pelaksanaan pekerjaan ini adalah suatu proses yang dipergunakan oleh organisasi untuk menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya mengadakan penilaian terhadap kinerja merupakan hal yang penting.

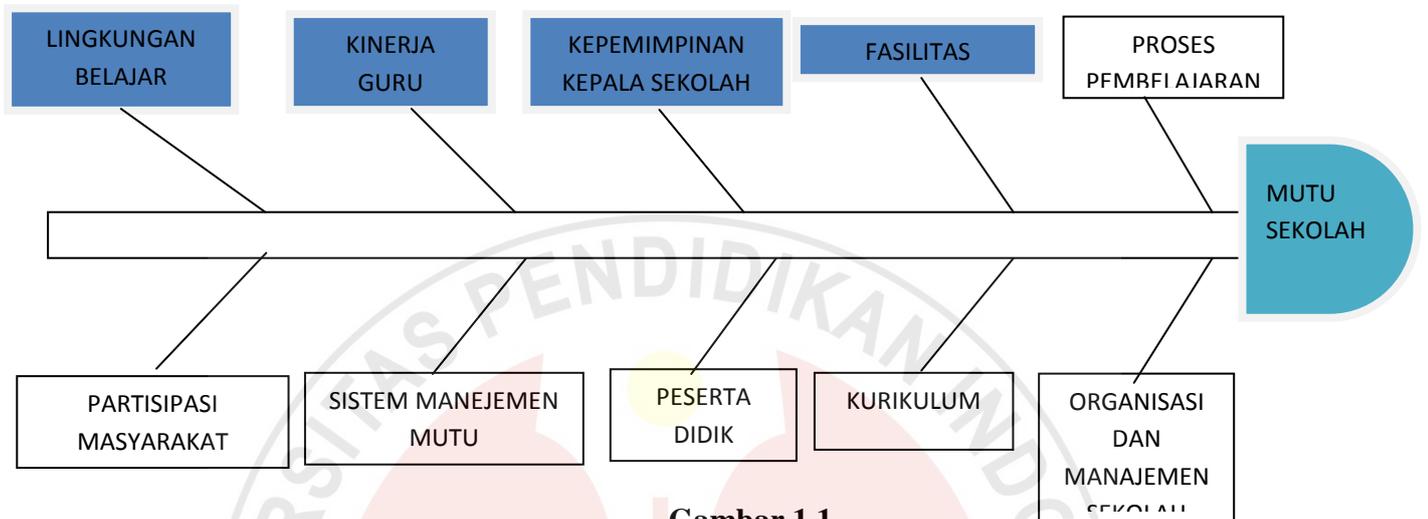
Berbicara tentang kinerja guru erat kaitannya dengan standar kinerja yang dijadikan ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban. Penilaian kinerja guru bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan sekolah sesuai dengan standar yang dibakukan dan sekaligus sebagai umpan balik bagi guru sendiri untuk dapat mengetahui kelemahan, kekurangannya sehingga dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kinerjanya.

Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan patokan-patokan tertentu. Kinerja guru adalah kemampuan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilihat dari penampilannya dalam melakukan proses belajar mengajar.

3. Fasilitas Belajar. Fasilitas belajar diartikan sebagai semua perangkat yang dibutuhkan guna menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dalam Panduan Teknis mengenai analisis kebutuhan sarana penunjang pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas (Direktorat Pembinaan SMA tahun 2009) disebutkan, bahwa fasilitas adalah apa-apa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Fasilitas ini mencakup sarana yang digunakan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Fasilitas pendidikan di Indonesia termasuk dalam kategori kurang (rendah).

Banyaknya berita tentang banyaknya bangunan sekolah yang roboh atau sekolah yang tidak memiliki bangku, sehingga anak-anak belajar dilantai merupakan indikator belum meratanya kelengkapan fasilitas. Padahal fasilitas belajar memiliki signifikansi cukup besar terhadap mutu sekolah belajar (Kompas, 11 September 2012; Pikiran Rakyat, 2 Oktober 2012; Republika, 2 Januari 2012).

4. Faktor lain yang berpengaruh pada mutu sekolah adalah lingkungan belajar. Menurut Frank Holtz (2004), sebagai pendidik, sangat penting bahwa guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua siswa dan mendukung untuk mencapai keberhasilan akademis mereka. Lingkungan belajar adalah lingkungan dimana proses belajar mengajar berlangsung dan bisa terjadi dimana saja dalam beberapa jenis lingkungan yang dilokalisasi (Eric Jensen, 2010: 12). Setiap lingkungan unik, mengandung banyak sekali event, isyarat, tujuan, proses, dan pemicu yang mempengaruhi pembelajaran. Menurut Eric, satu lingkungan dapat menjadikan seseorang lebih cerdas daripada lingkungan yang lain. Beberapa siswa harus berjuang lebih keras dalam kelas seorang guru dan berkembang mekar di kelas guru yang lain. Lingkungan belajar mempengaruhi siswa secara fisik, kognitif, dan emosional.



Gambar 1.1
Fishbone Analysis

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru, fasilitas belajar dan lingkungan belajar terhadap mutu sekolah pada SMA di Kota Bandung? dimana penelitian ini merupakan studi tentang pengembangan mutu sekolah yang dilakukan secara deksriptif analitik pada keempat variabel penelitian tersebut.

Untuk memudahkan proses pengkajian, maka perumusan masalah pokok tersebut perlu dijabarkan kembali kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran empirik kepemimpinan kepala sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung ?

- b. Bagaimana gambaran empirik kinerja mengajar guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung ?
- c. Bagaimana gambaran empirik fasilitas sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung ?
- d. Bagaimana gambaran empirik lingkungan belajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung ?
- e. Bagaimana gambaran empirik mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung
- f. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
- g. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap fasilitas belajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
- h. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap lingkungan belajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
- i. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru, fasilitas belajar, dan lingkungan belajar terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung, secara langsung dan tidak langsung?
 - 1) Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah secara langsung terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?

- 2) Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah melalui kinerja mengajar guru terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
- 3) Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah melalui fasilitas belajar terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
- 4) Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah melalui lingkungan belajar terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menguraikan gambaran mengenai mutu sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas melalui studi tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru, fasilitas belajar dan lingkungan belajar terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini, adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang:

- a. Gambaran empirik kepemimpinan kepala sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung ?
- b. Gambaran empirik kinerja mengajar guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung ?
- c. Gambaran empirik fasilitas sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung ?

- d. Gambaran empirik lingkungan belajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung ?
- e. Gambaran empirik mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung
- f. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
- g. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap fasilitas belajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
- h. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap lingkungan belajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
- i. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru, fasilitas belajar, dan lingkungan belajar terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung, secara langsung dan tidak langsung?
 - 1) Kepemimpinan kepala sekolah secara langsung terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
 - 2) Kepemimpinan kepala sekolah melalui kinerja mengajar guru berpengaruh terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?
 - 3) Kepemimpinan kepala sekolah melalui fasilitas belajar berpengaruh terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?

- 4) Kepemimpinan kepala sekolah melalui lingkungan belajar berpengaruh terhadap mutu sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung?

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan peneliti, dimana penelitian ini mempunyai kegunaan yang berarti, baik secara praktis ataupun secara teoritis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk kajian konsep berkenaan dengan pengaruh beberapa variabel determinatif mutu sekolah, seperti kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru, fasilitas belajar, dan lingkungan belajar.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dalam upaya peningkatan mutu sekolah, yang dihubungkan dengan variabel kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, fasilitas belajar, dan lingkungan belajar. Dengan informasi besarnya signifikansi pengaruh semua variabel yang dikaji dalam penelitian ini, diharapkan adanya bukti nyata yang menunjukkan komponen apakah yang harus diutamakan dalam proses perbaikan mutu sekolah.

E. Struktur Organisasi Penulisan

Disertasi ini diuraikan dalam bentuk laporan penelitian disertasi dengan struktur organisasi komponen disertasi yang terdiri dari 5 bab. Kelima bab tersebut ialah Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan

Hipotesis Penelitian, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.

Bab I Pendahuluan, membahas tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian, membahas tentang Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian. Bab III Metode Penelitian membahas tentang Metode Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Normalitas dan Uji Linieritas Data, dan Analisis Data Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas tentang Deskripsi Hasil Penelitian, Pengujian Hipotesis. Model Hipotetik Pengembangan Mutu Sekolah.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi membahas tentang Kesimpulan, dan Rekomendasi.